



Kemitraan Budidaya Ayam Ras, Antara Harapan dan Kenyataan

Broiler Chicken Farming Partnership: Between Expectations and Reality



Yoda Ekiandi, S.IP
Penelaah Teknis Kebijakan

Kemitraan usaha peternakan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan protein hewani, khususnya dari daging ayam ras pedaging yang menjadi salah satu sumber protein utama masyarakat. Melalui kerjasama kemitraan diharapkan peternak rakyat yang memiliki keterbatasan modal, akses pasar, maupun teknologi dapat terbantu oleh perusahaan inti atau integrator yang menyediakan sarana produksi ternak (sapronak), bimbingan teknis, serta jaminan pemasaran. Sebaliknya, perusahaan inti juga dapat memperoleh keuntungan melalui ketersediaan pasokan ayam yang stabil dan berkelanjutan dengan kemitraan. Oleh karena, kemitraan seharusnya menjadi solusi yang saling menguntungkan dan mampu meningkatkan daya saing subsektor perunggasan nasional.

Livestock business partnerships in Indonesia play an important role in supporting the availability of animal protein, particularly from broiler chicken meat, which is one of the main protein sources for the public. Through partnership cooperation, it is expected that small-scale farmers with limited capital, market access, and technology can be assisted by core companies or integrators that provide livestock production facilities, technical guidance, and marketing guarantees. Conversely, core companies can also benefit from a stable and sustainable supply of chickens through such partnerships. Therefore, partnerships should be a mutually beneficial solution that strengthens the competitiveness of the national poultry subsector.

Namun pada kenyataannya, praktik kemitraan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak peternak yang mengeluhkan bahwa prinsip saling menguntungkan dalam kemitraan belum sepenuhnya terwujud. Salah satu persoalan utama adalah mundurnya waktu panen ayam oleh perusahaan inti. Kondisi ini menimbulkan beban biaya tambahan bagi peternak, terutama dari sisi pakan, yang merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi. Semakin lama ayam dipelihara melebihi masa panen ideal semakin besar pula pakan yang harus diberikan. Selain itu, ayam yang terlalu lama dipelihara cenderung mengalami penurunan performa sehingga keuntungan yang diterima oleh peternak tidak sebanding dengan biaya tambahan yang dikeluarkan.

Selain masalah keterlambatan panen, kualitas saponak yang disediakan oleh perusahaan inti juga menjadi sorotan. Terdapat keluhan mengenai mutu anak ayam (DOC), kualitas pakan, serta obat-obatan dan vaksin yang tidak selalu sesuai dengan standar yang seharusnya. Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi produktivitas peternak plasma, yang menyebabkan hasil panen tidak optimal. Padahal, keberhasilan budidaya ayam ras salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas mutu saponak sejak awal periode pemeliharaan.

Untuk menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan (Hilirnak) melakukan evaluasi kemitraan kepada pelaku usaha perunggasan baik integrator maupun non-integrator pada bulan Juli dan Agustus 2025. Evaluasi dilakukan dengan menelaah perjanjian kemitraan yang dimiliki antara perusahaan inti dan peternak plasma. Dari hasil evaluasi ditemukan masih banyak perjanjian kemitraan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Misalnya terdapat perjanjian yang tidak mencantumkan klausul mengenai jangka waktu kemitraan, jangka waktu panen, serta standar mutu saponak. Kekosongan klausul tersebut membuka peluang terjadinya praktik yang merugikan peternak seperti panen yang tertunda tanpa ada kepastian waktu atau kualitas saponak yang tidak terjamin.

However, in reality, partnership practices in the field still face many challenges. Many farmers complain that the principle of mutual benefit in partnerships has not been fully realised. One of the main problems is the delay in harvest time by core companies. This condition creates additional costs for farmers, especially for feed, which is the largest component of production costs. The longer chickens are kept beyond the ideal harvest period, the more feed is required. In addition, chickens that are raised too long tend to experience performance decline, so the profits received by farmers are not proportional to the extra costs incurred.

Apart from delayed harvests, the quality of livestock production facilities provided by core companies is also a concern. Complaints include the quality of day-old chicks, feed, medicines, and vaccines that do not always meet the required standards. This ultimately affects the productivity of plasma farmers, leading to suboptimal harvests. Yet, the success of broiler farming is highly dependent on the quality of saponak from the very beginning of the rearing period.

To address these issues, the Directorate of Downstream Livestock Products conducted a partnership evaluation of poultry businesses, both integrators and non-integrators, in July and August 2025. The evaluation examined partnership agreements between core companies and plasma farmers. The results revealed that many partnership agreements were not in line with the Minister of Agriculture Regulation No. 13 of 2017 on Livestock Business Partnerships. For example, some agreements did not include clauses on the duration of the partnership, harvest period, or quality standards of production facilities. The absence of these clauses opens opportunities for unfair practices such as indefinite harvest delays or unguaranteed production facilities quality.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Hilirnak telah menerbitkan 36 surat rekomendasi kepada pelaku usaha kemitraan ayam ras pedaging. Beberapa rekomendasi penting antara lain: (1) penambahan klausul mengenai jangka waktu kemitraan agar memberikan kepastian bagi kedua belah pihak; (2) penetapan jangka waktu maksimal panen sehingga tidak ada lagi keterlambatan yang merugikan peternak; serta (3) dorongan agar pelaku usaha memperluas kepemilikan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) sehingga kapasitas pemotongan ayam dapat meningkat dan permasalahan penumpukan ayam di kandang bisa diatasi.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperbaiki kerja sama kemitraan. Namun perbaikan tidak cukup hanya melalui instruksi pemerintah. Diperlukan pula komitmen nyata dari perusahaan inti untuk menjunjung tinggi prinsip kemitraan, yaitu saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling ketergantungan. Tanpa adanya kesadaran dan itikad baik dari pihak inti, kemitraan hanya akan menjadi beban tambahan bagi peternak plasma.

Selain itu, asosiasi peternak ayam ras juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan posisi tawar anggotanya. Dengan adanya wadah yang kuat, peternak dapat menyuarakan kepentingan bersama termasuk dalam memastikan agar klausul perjanjian kemitraan lebih adil. Di sisi lain, pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi. Jika ditemukan pelanggaran yang berulang maka harus ada sanksi tegas agar pelaku usaha tidak merugikan peternak plasma.

As a follow-up, the Directorate issued 36 recommendation letters to broiler chicken partnership businesses. Some key recommendations include: (1) adding clauses on partnership duration to provide certainty for both parties; (2) setting a maximum harvest period to prevent delays that harm farmers; and (3) encouraging businesses to expand ownership of poultry slaughterhouses so that slaughtering capacity can be increased and chicken overcrowding in farms can be resolved.

These recommendations are expected to serve as a starting point for improving partnerships. However, improvements cannot rely solely on government directives. A real commitment is also required from core companies to uphold partnership principles: mutual need, mutual reinforcement, mutual benefit, mutual respect, mutual responsibility, and interdependence. Without awareness and goodwill from the core companies, partnerships will only become an additional burden for plasma farmers.

Furthermore, broiler farmer associations also play an important role in strengthening their members' bargaining position. A strong organisation enables farmers to voice their collective interests, including ensuring that partnership agreements are fairer. On the other hand, the government, together with the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), must enhance supervision and regulatory enforcement. If repeated violations are found, strict sanctions must be imposed so businesses do not disadvantage plasma farmers.



Kedepan keberhasilan kemitraan ayam ras pedaging sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan peternak. Apabila kemitraan dapat dikelola secara transparan dan adil maka peternak akan lebih sejahtera, perusahaan memperoleh keuntungan yang wajar, dan masyarakat mendapatkan pasokan daging ayam dengan harga terjangkau. Dengan demikian, tujuan besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing subsektor perunggasan dapat tercapai.

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan berkomitmen akan terus melakukan upaya pendampingan, monitoring, serta evaluasi secara berkesinambungan. Upaya ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, melainkan juga untuk memastikan terciptanya pola kemitraan yang sehat, berkeadilan dan berkelanjutan. Harapannya kemitraan budidaya ayam ras di Indonesia dapat menjadi model yang ideal bagi subsektor peternakan lainnya, sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, adil, dan kompetitif.

In the future, the success of broiler partnerships will greatly depend on synergy between the government, businesses, and farmers. If partnerships can be managed transparently and fairly, farmers will prosper, companies will gain reasonable profits, and society will have access to affordable chicken meat. In this way, the broader goal of strengthening national food security and improving the competitiveness of the poultry subsector can be achieved.

The Directorate of Downstream Livestock Products is committed to continuing assistance, monitoring, and evaluation on an ongoing basis. These efforts are not only aimed at solving short-term problems, but also at ensuring the creation of healthy, fair, and sustainable partnership models. The hope is that broiler chicken farming partnerships in Indonesia can become an ideal model for other livestock subsectors, thereby creating a healthier, fairer, and more competitive business ecosystem.